

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatkan jumlah penduduk sering dikaitkan dengan perkembangan suatu wilayah dan aktivitas masyarakat yang akan membawa pengaruh terhadap lingkungan salah satunya sampah. Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan besar yang lambat laun dapat mempengaruhi pembangunan atau *Sustainable Development Governance* (SDG's). Ibu Kota Jawa Tengah, Kota Semarang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Dapat diketahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk
2019	1.674.358
2020	1.685.909
2021	1.687.222

Sumber: Dispendukcapil Semarang Kota, 2022 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Semarang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk di Kota Semarang selalu mengalami peningkatan kapasitas. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang ini juga cenderung tinggi pada tahun 2019 dimana meningkat sebesar kurang lebih 11.000 penduduk. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi penduduk yang akan berdampak pada lingkungan terutama dalam aspek persampahan.

Sampah selalu menjadi momok bagi kehidupan perkotaan. Terkhusus bagi Kota Semarang yang memiliki misi untuk menjadi Kota Metropolitan yang berwawasan lingkungan. Sampah menurut UU. No. 18 Thn. 2008, merupakan bahan sisa dari hasil kegiatan manusia sehari - hari yang berbentuk padat dan tidak lagi digunakan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah organik (yang dapat diurai) dan anorganik (yang tidak dapat diurai). Sampah atau benda yang sudah tergolong menjadi sampah, perlu dikelola agar tidak terbengkalai menjadi sarang penyakit dan menjadi timbunan sampah.

Penanganan sampah yang tidak baik, berpotensi besar untuk menimbulkan penyakit seperti diare, cacingan, dan jamur. Disamping menimbulkan dampak bagi manusia terutama dalam aspek kesehatan, sampah juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan seperti pencemaran udara (menimbulkan bau tidak sedap), pencemaran tanah, bahkan banjir. Azwar (dalam Suryani, 2014: 72) berpendapat bahwa sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak terpakai, tidak disenangi, dan harus dibuang. Sampah merupakan sesuatu yang perlu dikelola sedemikian rupa sebaik - baiknya sehingga dapat terhindar dari hal - hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan akibat dari sampah.

Menurut Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) tenaga Kesehatan, Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak lagi disukai hasil dari aktivitas manusia yang berbentuk padat. Benda ini sudah tidak memiliki manfaat, maupun tidak memiliki harga ekonomis. Secara umum saat ini masyarakat masih banyak yang melakukan pengelolaan sampah sebatas kumpul, angkut dan buang. Tidak jarang masyarakat yang masih beranggapan bahwa sampah

meurpakan barang sisa yang sudah tidak lagi memiliki nilai, guna maupun hal yang bisa dimanfaatkan. Berkaca dengan hal tersebut maka masih diperlukannya penyesuaian yang terintegritas dan komprehensif kepada semua lapisan masyarakat untuk menyadarkan tentang nilai sampah dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah adalah suatu benda yang dianggap sudah tidak lagi digunakan, dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi. Perlunya pengelolaan sampah yang optimal agar sampah - sampah tidak menimbulkan hal negatif dan dapat membawa manfaat. Hingga saat ini sampah masih menjadi persoalan yang terus terjadi di masyarakat serta memerlukan upaya yang serius untuk melakukan pengelolaan sampah.

Sustainable Waste Indonesia (SWI) bekerjasama dengan *Unilever* Indonesia dan Indonesian *Plastic Recyclers* (IPR) didapatkan informasi bahwa sampah plastik khususnya di Pulau Jawa Bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020 hanya 11,8 persen yang berhasil di daur ulang. Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dalam portal informasi Indonesia yang diakses pada tanggal 15 Juli 2021 ([Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id) - Menenggelmkan Pembuang Sampah Plastik di Laut) menyatakan sebanyak 70 persen sampah plastik berpotensi masuk ke laut Indonesia.

Persoalan sampah kian memburuk apabila tidak adanya pengelolaan sampah yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak sampah - sampah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, masalah pengelolaan sampah masih menjadi salah satu dari sekian banyak masalah lingkungan yang termasuk kedalam masalah publik yang memerlukan perhatian khusus guna mengantisipasi hal terburuk terjadi.

Pengelolaan sampah dinilai sangat diperlukan karena melihat kemampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung sampah yang dikirim masyarakat secara langsung semakin memburuk. Pengelolaan sampah dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat dengan cara mengelola sampah menjadi sumber daya. Pengelolaan sampah terdiri dari tiga aktivitas sebagai prinsip pengurangan sampah berwawasan lingkungan yaitu dengan penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) (Batahari Dhiharcristiani dan Alfon Kimbal, 2008: 5).

Tabel 1.2
Data Timbulan Sampah di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Timbulan (ton)
2019	456,873.35
2020	466,010.79

Sumber: KLHK Republik Indonesia, 2021 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan timbulan sampah di Kota Semarang mengalami peningkatan dari Tahun 2019 hingga 2020 sebesar 913.741 Ton sampah. Menurut Capaian Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Tahun 2019 diperkirakan timbulan sampah di Kota Semarang mencapai 1.276 Ton/hari. Timbulan ini ada karena banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah di Kota Semarang sangat besar dan jika tidak diimbangi dengan penanganan dan pengelolaan sampah yang baik maka permasalahan ini akan terus bertambah.

Keadaan pengelolaan sampah yang masih memerlukan perbaikan, ditambah dimasa pandemi *Covid - 19* saat ini banyak masyarakat yang menjalani WFH (*Work from Home*) menjadikan tingkat konsumsi masyarakat dan produksi sampah turut

meningkat. Agar pengelolaan dapat tepat sasaran maka perlu juga melihat jenis sampah yang banyak diproduksi oleh masyarakat agar dapat menentukan skala prioritas penanganan sampah yang ada supaya dapat melakukan usaha pengelolaan sampah secara lebih serius.

Menurut UU. No. 18 Tahun 2004, pengelolaan sampah adalah kegiatan secara sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh dengan melakukan penanganan dan pengurangan sampah. Sehingga, perlu adanya penyelesaian yang komprehensif dan terintegrasi serta didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Berikut ini, Tabel 1.2 menunjukkan klasifikasi sumber - sumber sampah yang dihasilkan di Kota Semarang:

Tabel 1.3
Sumber Sampah di Kota Semarang

Sumber Sampah	Tahun 2019 (ton)	Tahun 2020 (ton)
Rumah Tangga	361,96	362
Perkantoran	7,5	7,5
Pasar	321,78	321,8
Perniagaan	15,6	15,6
Fasilitas Publik	66,03	66
Kawasan	84,28	84,3

Sumber: KLHK Republik Indonesia, 2021 (diolah).

Tabel 1.3 menunjukkan sumber - sumber sampah yang dihasilkan Kota Semarang sangat beragam. Sampah - sampah ini dikategorikan menjadi enam sumber sampah seperti pada tabel. Berdasarkan keenam sumber sampah tersebut, sampah rumah tangga menjadi sorotan sebagai penyumbang sampah terbanyak bagi timbulan sampah di Kota Semarang.

Menurut Hasibuan (2016: 42) sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari - hari. Sampah rumah tangga adalah limbah rumah tangga atau sampah yang berasal dari kegiatan sehari - hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah tidak lagi digunakan, disenangi dan dianggap sudah tidak lagi memiliki manfaat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari - hari.

Banyaknya sampah yang dihasilkan ini ditentukan dari jumlah rumah tangga yang ada. Sampah rumah tangga juga permasalahan yang serius karena menjadi penyumbang sampah terbanyak di lingkungan. Diperlukan pengelolaan yang optimal untuk menjawab permasalahan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meninggalkan pola lama berupa angkut buang dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang menjadi pengelolaan yang menerapkan 3R (*Reduce, reuse and recycle*). (Modul Prinsip Pengelolaan Sampah BPPSDMK, 2015: 2).

Implementasi pengelolaan sampah yang optimal membutuhkan alternatif - alternatif yang sesuai dan tepat sasaran. Salah satu bentuk alternatif yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga dapat menggunakan alternatif yang telah diresmikan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu pengelolaan berbasis masyarakat melalui Program Bank Sampah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. Pengelolaan dibagi menjadi dua pokok kegiatan yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. Penanganan sampah merupakan kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir yang bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Pengurangan sampah terdiri dari

tiga jenis aktivitas yaitu melakukan penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) (Batahari Dhihar Christiani dan Alfon Kimbal, 2008: 5).

Kota Semarang memiliki regulasi tentang Pengelolaan Sampah dan tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 dan Peraturan WaliKota Semarang Nomor 79 Tahun 2018. Peraturan ini merupakan hasil pertimbangan kurangnya pengelolaan sampah sehingga, perlu kejelasan, tanggung jawab dan kepastian hukum agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara mendasar yaitu tidak lagi berdasarkan kumpul angkut buang namun menjadi kumpul olah dan angkut.

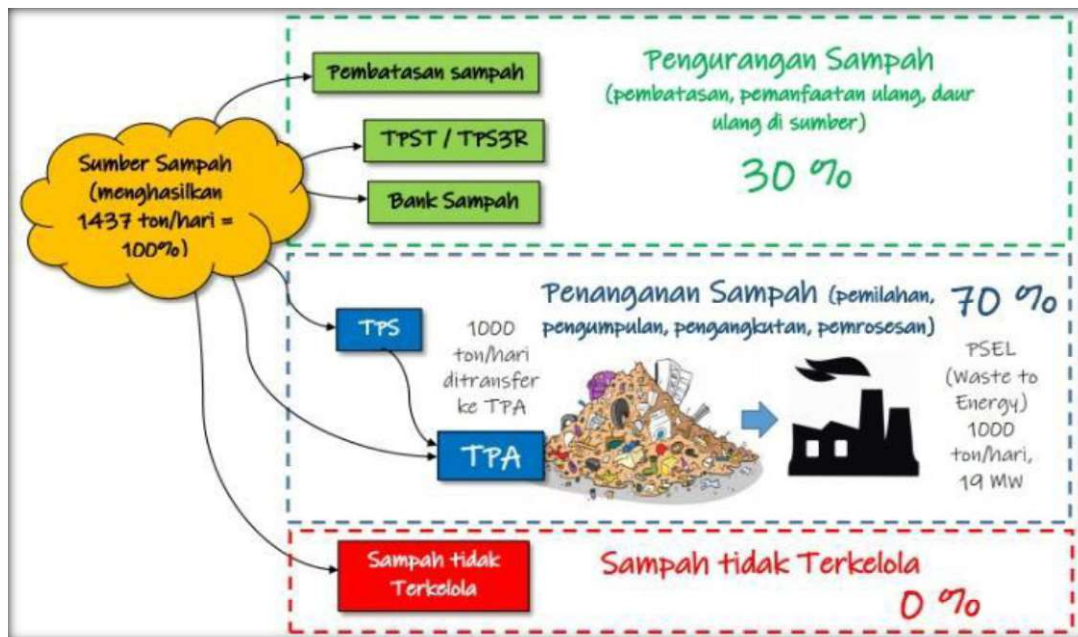
Pengelolaan sampah yang dibutuhkan saat ini adalah pengelolaan yang berkelanjutan sejalan dengan tujuan untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pengelolaan secara berkelanjutan yang dapat dilakukan adalah program bank sampah, seperti yang disosialisasikan Kementerian Lingkungan Hidup melalui bank sampah yang bersifat *social engineering* untuk mengajarkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah diasumsikan dapat mengurangi sampah hingga 30% (tiga puluh persen) seperti yang dimuat dalam Buku Putih Kota

Semarang Kelola Sampah oleh Bappeda Kota Semarang. Berikut penulis sajikan gambar skenario pengelolaan sampah tahun 2025 Kota Semarang.

Gambar 1.1

Skenario Pengelolaan Sampah Tahun 2025



Sumber: Buku Putih Kota Semarang Kelola Sampah oleh Bappeda Kota

Semarang, 2020.

Skenario pada gambar 1.1 menunjukkan pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa tahapan untuk mencapai target sampah terkelola seratus persen sehingga, perlu memaksimalkan tahapan awal dan tahapan - tahapan selanjutnya dengan baik. Tahapan pertama yaitu melakukan pengurangan sampah langsung dari sumber sampah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui program, bank sampah. Bank sampah dinilai mampu mengurangi sampah langsung dari sumbernya (sampah rumah tangga). melaksanakan program bank sampah yang

berguna bagi kehidupan sosial masyarakat dalam jangka waktu yang Panjang bank sampah dapat menjadi sistem perekonomian yang siap untuk masyarakat menengah kebawah.

Bank Sampah adalah sebutan yang diberikan terhadap suatu aktivitas pengelolaan sampah. Sebutan bank sampah ini muncul sebab melihat cara kerja bank sampah yang hampir sama seperti bank - bank pada umumnya dan yang membedakan adalah bank sampah menabung sampah yang menghasilkan uang. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau dan digunakan ulang yang memiliki nilai guna ekonomi.

Bank sampah dalam pengelolaan sampah secara mandiri memiliki peran yang sangat penting baik bagi sistem pengelolaan sampah maupun bagi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan kembali sampah untuk didaur ulang atau dijual, selain itu hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat (Romadoni, Tahyuddin, dan Husin 2018).

Bank Sampah selain menjadi wadah untuk bisa menabung sampah yang menghasilkan uang sehingga memiliki nilai guna ekonomi ini juga memiliki manfaat lain yaitu hasil dari pengumpulan sampah dapat disetorkan ke tempat pembuat kerajinan atau tempat pengepul sampah maupun dapat dimanfaatkan oleh Bank Sampah itu sendiri. Konsep pengelolaan bank sampah yang sama dengan perbankan namun pada bank sampah dilakukan oleh petugas sukarelawan. Bank Sampah ditujukan untuk membantu menangani dalam hal pengelolaan sampah dan

sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan rapi.

Keberhasilan bank sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat karena bank sampah merupakan kegiatan sosial dan masyarakat melakukannya secara sukarela. Program bank sampah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya dan untuk dapat berdaya dengan memiliki keterampilan dalam mengelola sampah seperti kemampuan menjadikan barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan nilai guna. Adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah memberikan dampak yang cukup signifikan terkait pengelolaan permasalahan sampah khususnya sampah rumah tangga. Maka perlu dilakukan dengan lebih baik lagi dan mendorong untuk seluruh masyarakat melakukan hal tersebut agar menjadi kebiasaan yang baik dan menciptakan kebiasaan baru dalam mengelola sampah dan dapat lebih bijak lagi dalam penggunaan barang yang menghasilkan sampah.

Menerapkan dan melaksanakan program bank sampah sangatlah berguna bagi kehidupan sosial masyarakat, dalam jangka waktu panjang bank sampah dapat menjadi sistem perekonomian yang siap untuk masyarakat kelas menengah kebawah. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara pemberdayaan masyarakat khususnya wanita/ ibu rumah tangga.

Salah satu bank sampah di Kota Semarang yang menerapkan pemberdayaan masyarakat adalah Bank Sampah Gedawang Asri. Bank sampah Gedawang Asri adalah kelompok sosial yang didirikan oleh masyarakat Kelurahan Gedawang di Kota Semarang dan mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang (DLH), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Pegadaian, Unilever dan PLN) dengan tujuan untuk keberlanjutan lingkungan yang berfokus pada penanganan masalah pengelolaan sampah khususnya sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga.

Tabel 1.4.
Pemenang Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Tingkat Kota Semarang Tahun 2021

No.	Kelurahan	Kecamatan	Pemenang
1	Kel. Gedawang	Kec. Gedawang	Juara I
2	Kel. Ngaliyan	Kec. Ngaliyan	Juara II
3	Kel. Sambiroto	Kec. Tembalang	Juara III
4	Kel. Tugurejo	Kec. Tugu	Harapan I
5	Kel. Jomblang	Kec. Candisari	Harapan II
6	Kel. Krobokan	Kec. Semarang Barat	Harapan III

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022.

Tabel 1.4. menunjukkan bahwa Bank Sampah Gedawang Asri merupakan bank sampah yang dapat menjadi percontohan bagi bank sampah di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan Bank Sampah Gedawang Asri pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagai bank sampah dengan pengelolaan terbaik di Kota Semarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri sebagai bank sampah dengan pengelolaan terbaik di Kota Semarang dapat menjadi sebuah acuan bagaimana sebuah sampah dijalankan. Oleh karena itu Bank Sampah Gedawang Asri menjadi menarik untuk diteliti.

Bank sampah yang diresmikan pada tahun 2018 ini merupakan bank sampah induk yang menaungi 10 (sepuluh) bank sampah yang ada di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Sepuluh bank sampah tersebut berada di setiap RW mulai dari RW 1 (satu) hingga RW 10 (sepuluh). Bank Sampah Gedawang Asri saat ini berada di bawah tanggung jawab ibu Dr. Ling. Sri Sumiyati,

S.T., M, Si dan termasuk kedalam bank sampah teraktif menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2020.

Sepuluh bank sampah yang berada di setiap RW ditujukan untuk memudahkan koordinasi, monitoring dan implementasi bank sampah agar dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Sehingga masyarakat dari berbagai RW tidak perlu jauh-jauh mengantarkan sampah yang sudah dikumpulkan menuju bank sampah induk. Adanya persebaran bank sampah di setiap RW juga dapat memudahkan dalam penyampaian informasi dan masukan sehingga dapat tersentuh oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Gedawang. Bank sampah di setiap RW memiliki Penanggung Jawab untuk media koordinasi antar pengelola dengan masyarakat.

Bank sampah Gedawang Asri dikatakan menerapkan Pemberdayaan masyarakat karena selain melakukan pemilahan dan pengepulan sampah yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas sampah, namun juga memberikan pelatihan dan ilmu terkait pengelolaan sampah untuk memperoleh manfaat selain dibidang lingkungan namun juga dibidang ekonomi dan sosial. Hal ini tercantum dalam empat motivasi utama dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gedawang Asri, yang terdiri atas:

1. Ibadah (*Khalifah fil Ardh*),
2. Lingkungan (Menjaga kelestarian alam),
3. Sosial (Kemasyarakatan), dan
4. Finansial (Menambah penghasilan).

Pelatihan yang diberikan beberapa diantaranya seperti diajarkan untuk membuat kerajinan berbahan dasar sampah (Taplak Meja, Vas Bunga, bunga, Boneka, Tempat Tisu dan lain sebagainya), membuat *Eco - enzym* dari sampah organik dikumpulkan, pembuatan batik Eco Print, Maggot dan terdapat kegiatan sosial juga yang dilakukan oleh bank sampah Gedawang Asri.

Bank Sampah Gedawang Asri memberikan program - program yang harapannya dapat memberikan pemahaman dan masyarakat dapat menggali potensi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan hingga masyarakat menjadi mandiri. Program - program yang diberikan dapat berupa pemberian pelatihan, pemberian edukasi, serta memberikan motivasi dan penguatan agar mampu berdaya.

Kegiatan Bank Sampah Gedawang Asri yaitu melakukan pengepulan dan penimbangan yang dilakukan setiap satu bulan sekali (wajibnya) atau lebih sesuai kesepakatan di setiap RW. Sampah - sampah yang dikumpulkan dan dipilah tersebut beragam namun didominasi oleh sampah anorganik seperti kardus, kertas, bungkus makanan, botol, kaleng, aluminium, besi, dupleks, dan lain sebagainya yang masih memiliki nilai jual. Bank Sampah Gedawang Asri juga melakukan pengolahan minyak jelantah (minyak bekas penggorengan) yang dijual kepada pengusaha biodiesel untuk diolah kembali.

Gambar 1.2

Kegiatan Pengepulan Sampah di RW 5



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 27 Maret 2021.

Gambar 1.3

Kegiatan Pengepulan Sampah di RW 1



Sumber: Bank Sampah Gedawang Asri, 11 April 2021.

Bank Sampah Gedawang Asri merupakan salah satu bentuk alternatif atau terobosan untuk mengurangi sampah yang diakibatkan dari pengelolaan sampah yang kurang optimal. Bank Sampah Gedawang Asri di dalamnya terdapat unsur konsep 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) yang mampu mengurangi volume sampah.

Perubahan - perubahan dapat terwujud apabila individu atau kelompok memiliki sikap, kemauan, pengetahuan, keterampilan yang dapat diandalkan dan seringkali juga memerlukan kelembagaan tertentu. Perubahan yang terencana ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu dan mau melakukan perubahan. Pemberdayaan merupakan proses perubahan yang memerlukan ide, gagasan, metode, teknologi, dan juga produk. (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 66)

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok yang tidak berdaya baik karena kondisi internal (persepsi atau pemikiran mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal ditindas struktur sosial yang tidak adil. (Suharto Edi, 2005: 60).

Dalam memahami proses pemberdayaan masyarakat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3 - 6) menjabarkan terdapat tiga tahapan pemberdayaan yaitu:

1. Penyadaran, merupakan pemberian kesadaran pada target bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak untuk memiliki sesuatu sehingga perlu membangun dan diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri.
2. Pengkapasitasan, merupakan tahapan setelah target disadarkan maka diberi daya. Pemberi daya diharapkan sudah mampu terlebih dahulu.

3. Pendayaan, merupakan tahapan akhir yaitu target diberi daya, kekuasaan dan otoritas bahkan peluang sesuai dengan kemampuan (kapabilitas dan kapasitas) serta memberikan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Pemberdayaan yang diberikan oleh Bank Sampah Gedawang Asri kepada masyarakat/ nasabah Bank Sampah yang didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini bermacam - macam. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memberikan bantuan dana untuk pembuatan Gedung Bank Sampah Gedawang Asri, memberikan meja, rak kursi sebagai tempat yang telah menjadi bank sampah induk di Kelurahan Gedawang. BUMN PT. PLN memberikan pelatihan Bersama Kelompok Sadar Lingkungan UNDIP berupa pelatihan Batik *EcoPrint* serta juga memberikan dorongan berupa dana untuk pembuatan toilet, pagar dan mesin jahit untuk Bank Sampah Gedawang Asri.

Pelatihan lain juga diberikan oleh Bidang Perguruan Tinggi beberapa diantaranya yaitu ada dari Doktor Ilmu lingkungan UNDIP dan Kelompok Studi Lingkungan (KSL) UNDIP yang memberikan pelatihan pembuatan Eco - Enzym. Bank sampah gedawang asri juga menjadi locus program pengabdian masyarakat untuk dapat manfaat dari UNDIP, UIN, USM, dan UDINUS serta dari pegiat lingkungan. Bank Sampah Gedawang Asri juga mendapat kunjungan dari Kementerian Kebudayaan Jepang Mr. Kuboki untuk saling berbagi pengetahuan terkait pengelolaan sampah dan membuat kerajinan berbahan dasar sampah.

Terdapat dukungan juga dari Unilever Persada Semarang *Green and clean* berupa buku pencatatan, timbangan dan kalkulator untuk beberapa RW. Serta, dari

Program Pegadaian yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk semangat mengelola sampah agar dapat menukarkan sampah menjadi emas melalui program Pegadaian dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.4
Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Sampah Plastik dan Kemasan Menjadi Ecobrick dan Produk Bernilai Ekonomis dari Tim Pengabdian UNDIP



Sumber: Bank Sampah Gedawang Asri, 27 Maret 2021.

Keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri yang pengelolaannya sudah menjadi yang terbaik di Kota Semarang seharusnya dapat mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang, utamanya di Kelurahan Gedawang. Keberadaan bank sampah ini sedikitnya harus mampu mengurangi permasalahan sampah yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Akan tetapi berdasarkan *pra - survei* penelitian, peneliti menemukan adanya beberapa permasalahan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri belum mampu mengatasi kenaikan timbulan sampah yang ada di Kelurahan Gedawang. Timbulan sampah seharusnya dapat berkurang dengan adanya kegiatan-kegiatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah yang dilakukan oleh bank sampah. Akan tetapi di Kelurahan Gedawang timbulan sampah tetap mengalami peningkatan sebagai berikut.

Tabel 1.5

Timbulan Sampah di Kelurahan Gedawang

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (Ton)
2018	2.192,44
2019	2.520,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.5 didapatkan informasi bahwa timbulan sampah di Kelurahan Gedawang selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Perlu diketahui bahwa Bank Sampah Gedawang Asri diresmikan pada tahun 2018. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dengan adanya Bank Sampah Gedawang Asri ini belum sepenuhnya dapat mengurangi timbulan sampah yang ada di Kelurahan Gedawang. Timbulan sampah yang seharusnya berkurang berkat bantuan dari adanya Bank Sampah Gedawang Asri dengan penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse and recycle*).

Kedua, tidak semua masyarakat sadar akan manfaat pengelolaan sampah melalui bank sampah sehingga menunjukkan bahwa tahapan penyadaran belum berjalan dengan maksimal. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3) menjelaskan bahwa tahap penyadaran merupakan pemberian kesadaran pada target bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak untuk memiliki sesuatu sehingga perlu

membangun dan diberdayakan hal tersebut dimulai dari diri mereka sendiri. Proses pemberdayaan tersebut dimulai dari diri mereka sendiri. Hal ini masih menjadi permasalahan sebab, Kelurahan Gedawang tidak semua masyarakat sadar bahwa mereka dapat memanfaatkan sampah untuk kepentingan lingkungan dan ekonominya melalui Bank Sampah Gedawang Asri. Hal ini ditunjukkan dari wawancara *pra-survei* yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu masyarakat di Kelurahan Gedawang sebagai berikut:

“Saya kurang tahu, mbak. Kalau bank sampah mungkin tanya ke ibu yang rumahnya sebelah sana (menunjuk rumah salah satu warga) itu malah lebih tahu. Saya nggak ikut bank sampah karena sampah di rumah saya sudah ada yang ngambilin” (*Pra Survei Wawancara tanggal 03 Mei 2021*).

Berdasarkan wawancara *pra - penelitian* yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan di Bank Sampah Gedawang Asri. Bahkan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan bank sampah di sekitarnya. Masyarakat juga mengakui lebih memilih untuk membayar petugas untuk mengangkut sampah di rumahnya. Hal ini diduga karena masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan kesadaran dari Bank Sampah Gedawang Asri bahwa sampah dapat dikelola lagi untuk menyelamatkan lingkungan dan menambah pemasukan ekonomi warga.

Ketiga, minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah penentuan rencana sehingga tahapan penyadaran pemberdayaan belum berjalan dengan maksimal. Salah satu upaya di dalam tahapan penyadaran adalah dengan melakukan musyawarah untuk menggali potensi masyarakat yang bisa diberdayakan. Namun, berdasarkan observasi *pra - penelitian*, saat ini musyawarah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gedawang Asri terbatas dilakukan oleh pengurus - pengurusnya saja.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara *pra – survei* yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu nasabah di Bank Sampah Gedawang Asri sebagai berikut.

“Kalau kegiatan-kegiatan bank sampah itu biasanya warga tinggal mengikuti saja mbak. Biasanya nanti informasinya disampaikan lewat PKK gitu. Nah nanti kita tinggal mengikuti saja. Kalau perencanaan-perencanaan programnya apa aja kita tidak tahu, itu biasanya yang menentukan dari atas” (*Pra Survei* Wawancara tanggal 03 Mei 2021).

Masyarakat masih belum diikutkan dalam musyawarah secara langsung untuk menentukan program - program bank sampah. Kondisi pandemi *Covid - 19* juga memperburuk keadaan dimana musyawarah di dalam Bank Sampah Gedawang Asri sempat dihentikan. Hal ini juga mengakibatkan pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui keberjalanan Bank Sampah Gedawang Asri.

Kempat, tahapan pendayaan yang belum mampu memberdayakan masyarakat sepenuhnya dari segi ekonomi. Tahap pendayaan merupakan tahapan akhir yaitu target diberi daya, kekuasaan dan otoritas bahkan peluang sesuai dengan kemampuan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:6). Akan tetapi berdasarkan observasi *pra - penelitian*, peneliti belum menemukan adanya masyarakat yang secara mandiri mampu menjadikan sampah ini menjadi sebuah peluang usaha, baik itu kerajinan maupun yang lain. Hal ini dibuktikan dari hasil *pra-survei* wawancara dengan salah satu nasabah di Bank Sampah Gedawang Asri sebagai berikut.

“Setahu saya di sini belum ada ya mbak yang membuka usaha dari hasil kerajinan sampah gitu. Kalau membuat kerajinan itu nanti biasanya rame-rame bikin terus nanti yang ngejualin dari bank sampahnya” (*Pra – Survei* Wawancara tanggal 03 Mei 2021).

Pra-Suvei wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih bergantung kepada bank sampah untuk mencari konsumen yang ingin membeli kerajinan dari daur ulang sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memperoleh pendayaan sepenuhnya dari segi finansial.

Kelima, *mindset* masyarakat yang keliru terkait pengelolaan sampah. Masih ada masyarakat yang menilai kegiatan pemilahan dan pengelolaan bank sampah adalah kegiatan yang membuang - buang waktu dan kurang menghasilkan manfaat yang besar bagi diri sendiri sehingga kurang berminat dalam melakukan pemilahan dan pengepulan serta membuat kreasi berbahan dasar sampah untuk dijual kembali dan bernilai ekonomis. Hal ini dibuktikan dari tabel berikut:

Tabel 1.6.
Tonase Sampah yang Dikelola Bank Sampah Gedawang Asri Tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah Nasabah	Tonase Sampah Dikelola
2018	356	4.980,70 kg
2019	484	1.305 kg

Sumber: Bank Sampah Gedawang Asri, 2021 (diolah).

Tabel 1.6. tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah nasabah Bank Sampah Gedawang Asri mengalami kenaikan. Akan tetapi jumlah tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Gedawang Asri justru mengalami penurunan. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penurunan minat masyarakat dalam melakukan pengepulan sampah di bank sampah. Hal ini dapat terjadi karena *mindset* masyarakat yang beranggapan bahwa pengepulan sampah di bank sampah merepotkan karena harus memilah dan menumpuk sampah di rumah sampai tiba waktu pengepulan.

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwasannya Tahapan Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang saat ini belum optimal, sehingga diperlukannya adanya penelitian secara mendalam untuk mengkaji Tahapan Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah ‘Gedawang Asri’ Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”** ini bertujuan agar peneliti dapat menjadikan sebagai bahan masukan dalam mengkaji tahapan pemberdayaan yang tepat khususnya dalam program bank sampah untuk memaksimalkan penanganan masalah pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat secara *sustainable* dan optimal agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang diharapkan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri belum mampu mengatasi kenaikan timbulan sampah yang ada di Kelurahan Gedawang,
2. Tidak semua masyarakat sadar akan manfaat pengelolaan sampah melalui bank sampah sehingga menunjukkan bahwa tahapan penyadaran belum berjalan dengan maksimal,
3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah penentuan rencana sehingga tahapan penyadaran pemberdayaan belum berjalan dengan maksimal,
4. Tahapan pendayaan yang belum mampu memberdayakan masyarakat sepenuhnya dari segi ekonomi.
5. *Mindset* masyarakat yang keliru terkait pengelolaan sampah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.7
Penelitian Terdahulu

(1) No	(2) Nama peneliti	(3) Judul	(4) Metode	(5) Aspek yang diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
1.	Wegi Trio Putra dan Ismaniar (2020)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	Kualitatif Deskriptif	1. Pemungkinan 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Penyokongan dan 5. Pemeliharaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sampah Panca Daya di Kecamatan Kuranji merupakan salah satu Lembaga pemberdaya masyarakat serta adanya peningkatan nasabah bank sampah secara signifikan hal ini dikarenakan bank sampah Panca Daya memiliki 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu melakukan penyadaran, menedukasi, memberikan rasa aman, memberikan bimbingan dan dukungan serta memelihara hubungan dan komunikasi yang baik. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah aspek yang digunakan dan locus yang dipilih. Penelitian ini menggunakan aspek dalam melihat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					tahapan berupa pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Sedangkan peneliti aspek yang digunakan adalah penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Lokasi penelitian terdahulu ini berada di Bank Sampah Panca Daya sedangkan peneliti di Bank Sampah Gedawang Asri.
2.	Nikmal Perdana (2017)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Oleh Bank Sampah Berlian Kelurahan Lenteng Agung	Kualitatif Deskriptif	1. <i>Engagement</i> (Persiapan) 2. <i>Assessment</i> 3. <i>Planning</i> 4. <i>Planning action</i> 5. <i>Monitoring</i> 6. <i>Evaluation and</i> 7. <i>Terminated</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan proses pemberdayaan melalui kegiatan daur ulang sampah di bank sampah Berlian, Kelurahan Lenteng Agung sudah berjalan dengan baik. Pemberdayaan dilakukan dengan berawal dari menyamakan persepsi masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengkajian masalah yang dirasakan oleh masyarakat dan SDM yang dimiliki, menyusun alternatif yang tepat dari permasalahan yang dihadapi, menjalankan program serta melakukan monitoring dan evaluasi selama implementasi program.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Perbedaan terletak pada lokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 ini berada di Kelurahan Lenteng Agung sedangkan pada penelitian ini lokusnya di Kelurahan Gedawang Asri Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Selain itu aspek untuk melihat tahapan pemberdayaan yang digunakan juga berbeda.
3.	Ahmad Rivai (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro	Kualitatif Deskriptif	1. Seleksi Lokasi/ Wilayah 2. Sosialisasi 3. Pelaksanaan 4. Pemandirian masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat upaya menyadarkan masyarakat memerlukan usaha yang besar dan tidak cepat, melalui pemberdayaan ini didapatkan hasil berupa adanya perubahan di segi lingkungan yang menjadi lebih bersih dan tertata serta dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari sampah yang mereka setorkan walaupun nilainya tidak terlalu besar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Ahmad Rivai ini selain berbeda dalam lokus namun juga berbeda dalam aspek yang digunakan untuk menilai tahapan pemberdayaan yang dilakukan. Penelitian sebelumnya ini menggunakan 4 aspek berupa seleksi wilayah, sosialisasi, pelaksanaan dan pemandirian. Sedangkan peneliti menggunakan 3 aspek yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.
4.	Muna Fauziah (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Yayasan Pulo Kambing Jakarta Timur	Deskriptif Kualitatif	1. Persiapan 2. Pengkajian 3. Perencanaan 4. Perumusan aksi 5. Pelaksanaan 6. Evaluasi 7. Terminasi	Hasil penelitian ini menunjukkan tahapan pemberdayaan sudah dilaksanakan dengan baik dan adanya perubahan pola fikir masyarakat dan muncul kemauan serta kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan. Namun dalam keberjalannya masih perlu adanya dukungan seperti memberikan pelatihan atau pengajaran penting mengelola sampah. Selain itu, masih perlu adanya inovasi dalam mengembangkan program - program yang ada.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Perbedaan penelitian ke empat ini terletak pada aspek yang digunakan untuk menilai tahapan pemberdayaan yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Sementara itu dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan aspek penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Perbedaan lainnya berada pada lokus penelitian dimana penelitian Muna Fauziyah (2021) ini berada di Bank Sampah di Yayasan Pulo Kamping Jakarta Timur sedangkan peneliti, berada di Bank Sampah Gedawang Asri Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
5.	Siti Juleha Triyana (2018)	Peran Fasilitator Program Gerbang Desa Saburai dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwodadi	Kualitatif Deskriptif	Proses Pemberdayaan: 1. Penyadaran 2. Pendampingan Peran fasilitator dalam pemberdayaan	Peran fasilitator dapat menjadikan suatu hal menjadi lebih mudah dan mendorong masyarakat memberikan yang terbaik untuk mencapai hasil yang di inginkan karena fasilitator dapat menjadi pemandu proses yang terbuka dan adil sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan situasi kondisi yang nyaman.

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan		masyarakat adalah: 1. Edukasi masyarakat 2. Memotifasi masyarakat 3. Mediator 4. Stimulasi	Keberhasilan fasilitator desa Purwodadi dalam Pemberdayaan tidak terlepas dari faktor pendukung. Faktor pendukung berupa adanya etos kerja, swadaya yang baik, partisipasi masyarakat dan kemampuan fasilitator. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses pemberdayaan yaitu pada proses penyadaran masyarakat dimana masyarakat kurang memiliki kesadaran akan limbah yang mengganggu aktifitas masyarakat setempat. Perbedaan penelitian oleh Siti Juleha Triyana (2018) dengan peneliti adalah aspek yang digunakan dalam melihat tahapan yang dilakukan selain itu, penelitian ini memberikan masukan terkait aspek - aspek yang mempengaruhi peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Perbedaan selanjutnya ada pada lokus penelitian yaitu penelitian Siti Juleha (2018) ini berada di Kabupaten Lampung selatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					sementara penelitian peneliti ada pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
6.	Nisfi Fahriani A, Santoso Tri Raharjo dan Hery Wiboro (2016)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung	Kualitatif	Komponen utama pemberdayaan masyarakat: 1. Pemberdayaan Personal 2. Pemberdayaan Kelompok Kecil 3. Pengorganisasian masyarakat 4. Kemitraan 5. Aksi sosial dan Politik	Hasil penelitian yang dilakukan ini menghasilkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh ibu ibu dan karangtaruna desa. Selain itu, pemberdayaan ini digerakkan berbagai komunitas seperti komunitas Batur Ulin dan Komunitas Bengkel Awi di Desa Ciburial. Desa Ciburial ini memiliki potensi dan terkenal dengan Kawasan perindustriannya. Melalui ke 5 aspek pemberdayaan tersebut berupa pemberdayaan personal, kelompok kecil, pengorganisasian masyarakat, kemitraan dan aksi sosial telah dilakukan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian peneliti, pemberdayaan masyarakat masih ditemukan beberapa permasalahan terutama dalam tahapan pemberdayaan. Selain itu, perbedaan kedua ada pada indicator yang digunakan untuk menilai tahapan pemberdayaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Fitri Febrina Aggaraini, Titik Djumiarti (2020).	<i>The Process of Community Empowerment in Integrated Waste Management in the Pedurungan Kidul Village Semarang City.</i>	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. Tahapan: 1. Penyadaran 2. Pengkapasitasan dan 3. Pendayaan.	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui tiga tahapan tersebut masih belum berjalan dengan maksimal masih terdapat permasalahan berupa masyarakat yang belum sadar hidup bersih dan sehat, pada tahap pengkapasitasan sebagai bentuk pemberian kemampuan pada penelitian ini sangat mengandalkan peran Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pelatihan tersebut.
8.	Nisa Tullatifah (2020)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Studi	Kualitatif Deskriptif	Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat agar dalam kegiatan bank sampah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kasus Bank Sampah Srayan Makarya, Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas)		Ekonomi Masyarakat: Pendorong: 1 keterlibatan Anggota. 2. Sarana dan Prasarana 3. Keterlibatan masyarakat sekitar. 4. Kerjasama dengan pihak lain Penghambat: 1 Ketidak disiplin nasabah 2. <i>Salahnya mindset</i> yang dimiliki masyarakat sekitar.	masyarakat terus meningkat dan bisa melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Selain itu, masih perlu adanya training bagi pengurus agar dapat mempengaruhi dan menarik masyarakat untuk menjadi nasabah. Pada penelitian ini, akan dijadikan pedoman peneliti sebagai pengukur faktor pendorong dan penghambat dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan melalui program bank sampah. Melihat faktor - faktor baik pendorong dan penghambat yang mencakup capabilitas yang sama dengan Bank Sampah Gedawang Asri yang mengalami permasalahan yang sama.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Nur Dewi, Ghozali Maskie (2020)	<i>Empowerment of Spice Farmers Community in Maluku Utara for Sustainable Agricultural Development</i> (Pemberdayaan Komunitas Petani Rempah di Maluku Utara untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan)	Kualitatif deskriptif	Tahapan Pemberdayaan yang dilakukan: 1. Pencerahan 2. Pembangunan 3. Penegakan hukum Upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, keterampilan dan kekuatan masyarakat.	Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan yang diberikan kepada petani untuk keberlanjutan dan pembangunan belum maksimal sehingga perlu adanya beberapa alternatif agar pemberdayaan tersebut dapat sustainable jika CSR sudah tidak lagi memberikan dukungan kepada komunitas tani rempah tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada tahapan yang digunakan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang peneliti teliti sama - sama memiliki CSR atau Corporate Social Responsibility dan masih memberikan dukungannya kepada nasabah Bank Sampah Gedawang Asri. Selain itu, penelitian terdahulu ini sobjek nya adalah komoditas tertentu yaitu petani rempah sedangkan subjek peneliti adalah nasabah yang notabane nya sebagai masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam. Perbedaan selanjutnya yaitu aspek yang

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					digunakan untuk melihat tahapan pemberdayaan dan lokus yang digunakan juga berbeda.
10.	Mujahidin (2019)	<i>The process of Society Empowerment in Managing Waste for Sustainable Development (Study on Waste Bank in Sicanang District Belawan)</i>	Kualitatif Deskriptif	Proses yang dilakukan dalam pemberdayaan yaitu melalui: 1. Peningkatan partisipasi 2. Sosialisasi pemilahan sampah 3. Pelatihan daur ulang sampah	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya efek positif pada perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dimana keiga hal tersebut merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini digunakan sebagai penguat data yang dipapakan pada penelitian ini yaitu mengacu pada pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah ini membawa dampak yang berkelanjutan terutama dalam ketiga hal utama yaitu perkembangan sosial, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang mana Bank Sampah Gedawang Asri mencakup ketiga hal tersebut.

Peneliti menyajikan sepuluh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi dan kajian Pustaka pada penelitian tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Senarang. Pada penelitian terdahulu ini juga dapat pembeda bagi penelitian yang akan peneliti lakukan yang dapat membedakan fenomena - fenomena pada penelitian terdahulu..

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa faktor - faktor penghambat dan pendorong dalam tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap pembacanya khususnya pada bidang administrasi publik mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah serta dapat berguna bagi pengemban teori dan analisisnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adanya penelitian ini diharapkan pengelola bank sampah dan masyarakat di Kelurahan Gedawang dapat merasakan dan memahami pentingnya bank sampah dan pemberdayaan yang diadakan di kelurahan Gedawang melalui bank sampah. Pemberdayaan masyarakat yang baik melalui bank sampah diharapkan menjadikan masyarakat lebih berdaya dan lebih produktif lagi sehingga memberikan manfaat dan perubahan yang besar baik dibidang lingkungan yang semakin asri, ekonomi yang semakin membaik dan kekeluargaan yang semakin harmonis antar warga di Kelurahan Gedawang serta dapat bermanfaat menjadi bahkan tambahan untuk penelitian selanjutnya.

Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan dapat menjadi masukan dan pengetahuan baru dan juga bagi mahasiswa administrasi publik khususnya, terkait bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

1.7. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan dipaparkan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teori merupakan kajian berupa beberapa teori yang diperoleh melalui kajian pustaka yang digunakan sebagai pendukung penelitian berkaitan dengan kajian peneliti serta mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1.7.1. Administrasi Publik

Penjelasan akan berbeda tergantung dari sudut pandang, latar belakang pendidikan dan juga dapat dipengaruhi karena pengalaman yang berbeda dari

pengemuka. Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Definisi administrasi menurut Sondang Siagian (dalam Mariati Rahman, 2017: 8) administrasi merupakan bentuk kerjasamayang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berdasarkan pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat ini sejalan dengan definisi administrasi dari Waldo (dalam Wirman Syafri 2012: 10) administrasi merupakan bentuk usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian publik secara umum adalah sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Menurut Inu Kencana Syafiie (dalam Nurhartati 2013: 4) publik didefinisikan sebagai beberapa manusia yang memiliki keseragaman pikiran, harapan, sikap serta tindakan yang baik berdasarkan norma dan nilai yang dimiliki.

John Pfiffner (dalam Mariati Rahman, 2017: 11) mendeskripsikan Administrasi Publik merupakan implementasi kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Pemerintahan dan didominasi oleh perwakilan politik. Disisi lain Pfiffner memberikan definisi lain administrasi publik yaitu sekelompok orang untuk menjalankan kebijakan pemerintah terutama dalam tugas sehari - hari.

The Liang Gie (dalam Mariati Rahman, 2017: 11) juga turut mengungkapkan bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian penyelenggaraan atau perbuatan yang diiringi usaha dan kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbeda dengan pendapat dari Land dan Rosebloom (dalam Akib 2009: 1) menjelaskan administrasi publik sebaiknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan bekerja secara efektif dan efisien serta tanggap dalam kebutuhan masyarakat.

Menurut Hughes (dalam Akib 2009: 1) administrasi publik diartikan sebagai kegiatan pelayanan atau melayani publik sebagai bentuk menjalankan kebijakan yang didapatkan dilaksanakan berdasarkan dengan prosedur sebagai bentuk implementasi kebijakan kedalam suatu bentuk aktivitas atau tindakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai administrasi publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik untuk mengatasi persoalan publik melalui kebijakan yang akan diimplementasikan untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

1.7.2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Henry (dalam Akib 2009: 3 - 6) mengungkapkan bahwa artikulasi perkembangan administrasi dapat dilihat melalui paradigmanya. Nicholas Henry mengemukakan terdapat Lima paradigma administrasi:

1. Dikotomi Politik Administrasi (1900 - 1926)

Pada era ini paradigm ini Frank J. Goodnow dan Leonard menyatakan pemerintahan memiliki dua fungsi yakni fungsi politik guna persoalan terkait pembuatan kebijakan dan kehendak negara. Kedua sebagai fungsi administrasi terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Pada paradigma ini disampaikan secara tegas bahwasannya administrasi publik harus dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai dan politik seharusnya tidak mencampuri urusan administrasi.

2. Prinsip Administrasi Publik (1971 - 1937).

Tokoh pada periode ini Mary Parker Follet, Henry Fayol, Jame Mooney dan Alan C. Reile. Pada masa ini, kebanyakan beranggapan bahwa prinsi Administrasi Publik bersifat *universal* yaitu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas tersebut diartikan berlaku untuk setiap lingkungan tanpa melihat budaya, lingkungan, fungsi, misi bahkan institusi. Prinsip yang ditetapkan pada era ini terkenal dengan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*). Lokus Administrasi pada era ini tidak dapat diungkapkan secara jelas karena dampak dari sifat yang

sangat *universal* namun, paradigma ini telah memperjelas pada bagian fokus yang ada.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970).

Periode ketiga kembali mempersoalkan terkait paradigma satu dan dua. Banyak yang mempersoalkan terkait pemisahan Administrasi dengan politik sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan terdapat persoalan juga dengan prinsip administrasi yang tidak konsisten. Serta beranggapan bahwa administrasi publik bukan bebas nilai melainkan dipengaruhi oleh nilai. Melalui paradigma ketiga administrasi Negara sebagai ilmu politik ini menganggap bahwasannya administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi tidak jelas akibat prinsip administrasi yang masih mengandung banyak kelemahan mengakibatkan administrasi publik pada saat ini mengalami krisis identitas karena politik menjadi lebih dominan di ranah administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 - 1970).

Paradigma keempat ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari paradigma kedua dengan dikembangkan lebih mendalam dan ilmiah. Pada paradigma ini berfokus pada analisis manajemen, perilaku organisasi, penerapan teknologi moderen seperti metode kuantitatif dan analisis sistem. Adanya dua arah perkembangan, lokus pada paradigma ini juga belum jelas karena fokus yang dikembangkan dapat diterapkan dimana saja.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 - Sekarang).

Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik adalah paradigma terakhir yang sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam administrasi publik yaitu teori manajemen, teori organisasi dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik. Paradigma ini sudah memberikan kejelasan fokus yang akan dipelajari oleh administrasi publik dan lokus atau tempat studi yang dapat diterapkan. Adanya kejelasan ini maka paradigma ini dianggap sebagai suatu rangkaian yang menghubungkan antara fokus administrasi publik dengan lokusnya sehingga adanya kesinambungan antara berbagai macam teori - teori yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah publik yang menjadi lokus administrasi publik.

Berdasarkan penjelasan ini menunjukkan bahwasannya penelitian ini masuk dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal ini karena di dalam paradigma ini sudah dijelaskan terdapat kejelasan antara fokus dan lokus di dalam Administrasi Publik. Kejelasan Fokus dan Lokus Administrasi Publik dalam penelitian ini dimana fokusnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan lokusnya antara lain masalah - masalah publik. Sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai permasalahan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri Kecamatan Banyumanik.

1.7.3. Manajemen Publik

Manajemen adalah suatu cara yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perencanaan pencapaian yang diinginkan tanpa manajemen tujuan akan

menjadi sulit untuk dicapai serta manajemen dapat digunakan untuk mengatur suatu manfaat, efisiensi dan efektivitas (Abdurrahman, 2018: 8).

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Moenir, 2016: 26 - 27) menjelaskan manajemen adalah hubungan antara manusia, proses dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi dengan pemanfaatan sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya mesin untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Publik dalam Bahasa Yunani dikenal dengan istilah *kumon*, dalam Bahasa Inggris sebagai *common* yang artinya hubungan antar individu. Menjadikan publik kerap disandingkan sebagai sebuah aktivitas yang berisikan kegiatan manusia yang dilihat perlu diatur oleh atuan sosial maupun Pemerintah atau sering disebut sebagai sektor publik atau sektor swasta. (Ismail Nawawi, 2013: 3 - 4).

Manajemen publik menurut Overman (dalam Keban: 2008: 85) merupakan suatu studi dari organisasi serta merupakan gabungan dari fungsi - fungsi manajemen seperti *planning, organizing, controlling and actuating* disisi lain dengan SDM, informasi, keuangan, politik, dan fisik. OTT, Hyde dan Shafritz (1991: 11) menjelaskan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang Administrasi Publik yang saling bertumpang tindih satu sama lain. Kebijakan publik dianggap seperti memiliki peran sebagai sistem otak dan syaraf sedangkan manajemen publik dianggap seperti sirkulasi pernafasan dan sistem jantung dalam tubuh manusia. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwasanya manajemen publik digunakan sebagai proses menjalankan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah dari kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bawasanya manajemen publik adalah kegiatan mengatur dan mengelola dari tahap perencanaan sampai evaluasi sumber daya telah direncanakan sebelumnya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat serta prinsip antara manajemen dan kebijakan publik adalah saling berkaitan satu sama lain.

Hubungan antara manajemen publik dengan pemberdayaan masyarakat adalah seperti hubungan kemampuan manajerial pengelola dalam upaya menggerakkan, mengelola, mengatur serta memberi daya kepada masyarakat agar mampu atau berdaya.

1.7.4. Pengembangan Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di dalamnya mencakup pembangunan yang berdasarkan pada masyarakat (*community - based development*). Berdayanya masyarakat merupakan unsur yang menjadikan masyarakat mampu untuk bertahan, serta mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk usaha dalam melakukan pembangunan masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat berarti menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Pembangunan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk perencanaan sosial untuk melakukan perubahan sosial masyarakat yang dulunya tidak mampu menjadi mampu dengan usahanya sendiri.

Menurut Soetomo (2011: 70) program pembangunan di Indonesia banyak yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat hal ini disebabkan salah satunya karena

masyarakat tidak diikuti sertakan dalam penentuan program atau dalam perumusan program sehingga aspirasi, kepentingan dan kebutuhan tidak dapat tersalurkan dengan baik dalam program - program yang rencanakan. Menurut Soleh (2014: 105) Karakteristik utama pada konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah:

1. Pendekatan pada lingkup lokal baik dalam maksud kelembagaan, lingkungan, komunitas maupun budaya.
2. Berdampak untuk *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative*.

Conyers dan Hills (dalam Huraerah, 2008: 12) pembangunan merupakan suatu proses untuk memperbaiki atau memajukan suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. Huraerah, Abu dalam bukunya Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses perubahan nilai - nilai yang ada pada kehidupan masyarakat menuju kearah yang lebih baik secara berkesinambungan dan terencana untuk kesejahteraan masyarakat.

1.7.5. Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *empowerment* yang artinya pemberkuasaan. Dimana pemberkuasaan sendiri juga dapat diartikan sebagai memberikan kekuasaan kepada pihak yang kurang beruntung atau lemah. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk usaha untuk membangun keberadaan seseorang di kehidupannya dengan memberikan dorongan dan agar memiliki kemampuan atau keberdayaan tersebut. Pemberdayaan menurut etimologi berasal dari kata “daya” yaitu kemampuan, kekuatan atau sering diartikan juga sebagai

proses menuju keadaan berdaya, keadaan memperoleh kekuatan maupun proses pemberian kemampuan dari yang memiliki daya kepada yang kurang mampu. (Keban, dalam Aniq 2019: 17).

Pemberdayaan selain sebagai pemberian daya juga sebagai ilmu pengetahuan seperti yang diungkapkan oleh Soetomo dalam Aniq (2019: 18) yaitu ilmu pengetahuan yang termasuk kedalam pendidikan informal bertujuan meningkatkan kemampuan dan kreativitas seseorang atau masyarakat agar lebih dapat lebih berkembang.

Menurut Jim ife dan Frank Tesoriero (1995: 182) pemberdayaan merupakan sebuah upaya memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depan mereka sendiri serta turut berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Jim ife dan Frank Tesoriero (1995: 206) juga menjelaskan pemberdayaan sebagai upaya guna meningkatkan kemampuan menuju kearah kemandirian, pemberdayaan menegaskan pada pentingnya masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk meningkatkan kemampuannya.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberdayaan adalah upaya memberikan kemampuan atau daya kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya agar dapat mandiri dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mensejahterakan kehidupannya sendiri.

1.7.6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya sendiri hingga mampu dan bebas mengatasi masalah yang diambil berdasarkan dengan keputusan mandiri. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan kekuatan dan kemampuan sehingga dapat mengenali kebutuhannya sendiri serta mampu mengatasi persoalan yang akan terjadi di masa depan. (Sumartiningsih, 2004: 50).

Didukung oleh pendapat dari Sulistiyan (2004: 77) bahwasanya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berarti suatu gabungan dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang mampu atau kurang berdaya menjadi lebih mampu dan berdaya.

Pemberdayaan masyarakat menurut Gunawan dalam Hendrawati Hamid (2018: 10) adalah bentuk tindakan sosial sebuah komunitas atau masyarakat mengorganisasikan diri mereka kedalam perencanaan atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial yang ada atau untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.

Berbeda dengan definisi pemberdayaan masyarakat oleh Ginanjar (1997: 11 - 12) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan segenap usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang saat ini dalam kondisi kurang atau tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan atau keterbelakangan.

Shadow dalam Rukminto Adi (2008: 85) Pemberdayaan masyarakat ini mendefinisikan “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Suatu Program dan Proses”.

Dikatakan pemberdayaan sebagai suatu program yaitu pemberdayaan dilihat dari tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses merupakan kegiatan yang berkesinambungan sepanjang organisasi atau komunitas tersebut masih ingin untuk melakukan perubahan maupun perbaikan yang tidak terbatas waktu atau tidak terpaku pada satu program kerja saja.

Hal ini didukung pernyataan dari Mardikanto, Soebianto (2013: 61) yang mengatakan pemberdayaan merupakan sebuah proses atau rangkaian yang digunakan untuk mengoptimalkan atau memperkuat keberdayaan dari masyarakat yang menjadi aktor utama dan penentu pembangunan. Dikatakan sebagai sebuah proses berarti melalui kemampuan untuk memperoleh atau mengakses kesempatan - kesempatan yang ada serta berpartisipasi dalam usaha memperbaiki kualitas hidup untuk individu dan kelompok

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk proses atau tahapan kegiatan yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya kurang berdaya oleh masyarakat yang sudah memiliki daya dengan upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian, kekuatan, kemampuan atau pengetahuan untuk menanggapinya.

1.7.7. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai tujuan diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai melalui perubahan sosial. Perubahan sosial ini berarti berubah menjadi masyarakat yang berdaya dengan memiliki kemampuan, pengetahuan serta kekuasaan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik maupun sosial seperti kemampuan menyampaikan pendapat, aktif menjalankan tugas - tugas dan turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang ada.

Edi Suharto, (2014: 60) Pemberdayaan adalah tujuan yang seringkali digunakan sebagai indikator mengukur keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sehingga, dalam menilai tujuan pemberdayaan masyarakat apakah sudah tercapai dan membawa dampak dapat dilihat melalui proses dari pemberdayaan.

Berbeda dengan pendapat dari *Robbins Chatterjee & Canda*, 1998 dalam Sururi Ahmad, 2015:3) yang berinti tujuan dari pemberdayaan masyarakat termasuk dalam strategi pembangunan berbasis masyarakat yang merujuk pada usaha perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik maupun mental.

Wegi Trio Putra, (2020: 3) mengungkapkan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui sebuah kegiatan sebagai upaya meningkatkan kapasitas kemandirian masyarakat serta memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam menanggapi.

Sulistiyani (2004: 80) mengungkapkan tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk agar masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian masyarakat dapat dilihat melalui kemampuan dalam berpikir, menentukan dan melakukan sesuatu yang dianggap tepat demi menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan orang yang lemah atau kurang beruntung menuju keadaan berdaya yang memiliki

kemampuan, pengetahuan dan kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melingkupi kebutuhan ekonomi, fisik maupun sosial serta dapat memberikan pendapatnya, memiliki pekerjaan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pemberdayana masyarakat juga dapat berupa bentuk upaya untuk merubah karakter dan cara pandang seseorang terhadap sesuatu menjadi lebih baik dan lebih sadar.

Berdasarkan pendapat diatas maka tujuan dari adanya pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat dalam menghadapi ketidak berdayaaan dan ketidakmampuan dari hal yang dihadapi serta adanya kepedulian untuk mengatasi persoalan yang dihadapi secara bersama - sama menuju kearah yang lebih baik lagi.

1.7.8. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Sumardoyo (dalam Mardikanto 2013: 113) menjelaskan terdapat tiga pokok dalam setiap pemberdayan masyarakat yaitu disebut sebagai Tri Bima, terdiri dari Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.

1. Bina Manusia.

Bina manusia menjadi upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan pada setiap usaha pemberdayaan masyarakat karena merupakan sumber daya utama dan pelaku dari pemberdayaan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan manusia berupa pengembangan atau penguatan kapasitas masuk kedalam bina manusia. Pengembangan kapasitas dapat berupa pengembangan kapasitas individu dapat berupa pengembangan keperibadian, dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kelembagaan dapat berupa adanya kejelasan visi - misi, struktur, strategi, proses, dan kejelasan interaksi baik sesama individu maupun interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

Terakhir, pengembangan kapasitas sistem berupa pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama dan pengembangan interaksi dengan entitas diluar sistem.

2. Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan adalah melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti:

- Peningkatan pengetahuan teknis serta meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
- Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimalisasi pengelolaan bisnis
- Perbaikan manajemen agar lebih efektif, efisien dan pengembangan jejaring kemitraan
- Peningkatan aksesibilitas terhadap informasi dan modal pasar.
- Advokasi kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat.

3. Bina Lingkungan.

Lingkungan dapat berupa lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Lingkungan hidup dapat berkaitan dengan lingkungan alam sedangkan lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial yaitu masyarakat dan alam sekitarnya. Tanggung jawab lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan melakukan berbagai tindakan seperti investasi dan operasi (perlindungan, pelestarian dan pemulihan/rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pada ketiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan atau bina ini Mardikanto menambahkan pentingnya bina kelembagaan karena ketiga ini hanya akan terwujud seperti yang diharapkan apabila didukung oleh keefektivitasan beragam kelembagaan diperlukan. Lingkup pemberdayaan yang masuk kedalam penelitian ini adalah bina manusia karena pada penelitian ini berusaha melihat pemberdayaan melalui tahapan yang terdiri dari penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan yang mana hal ini sangat berhubungan erat dengan manusia berupa usaha pengembangan dan penguatan kapasitas manusia.

1.7.9. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dikatakan sebagai proses karena merupakan suatu proses, maka proses menjadi aspek penting dalam menilai pemberdayaan yang dilakukan, Proses dapat juga dikatakan sebagai tahapan. Terdapat berbagai macam tahapan yang dapat dilakukan untuk menilai, menelaah pemberdayaan yang ada. Tahapan - tahapan dapat dilakukan atau dinilai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan respon dari masyarakat.

Tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi (2016) dapat dilakukan dengan beberapa tindakan agar dapat mencapai keberhasilan pemberdayaan. Tahapan dilakukan sebagai upaya pengembangan masyarakat yang diharapkan akan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan dapat dilihat melalui suatu program. Suatu pemberdayaan dapat dilihat melalui tahapan tahapannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Nana Mintarti dalam (Habibah, 2009: 18 - 19) yaitu:

1. Penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan dengan pengenalan lingkungan dan potensi diri serta membantu komunitas untuk melihat keadaan dirinya dengan kekuatan domestik maupun global dalam bentuk teknologi, informasi, budaya, politik hingga modal sosial.

2. Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian adalah tahapan dimana organisasi harus dari prakarsa rakyat secara sukarela serta diadakannya suatu program penguatan organisasi.

3. Kaderisasi

Tahapan ini adalah organisasi perlu menyiapkan kader kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan mengambil alih tugas, pendampingan setelah program berakhir. Kader dipilih secara partisipatif oleh masyarakat.

4. Dukungan teknis

Tahapan pemberdayaan berupa dukungan teknis ini merupakan proses produksi untuk membantu dalam perbaikan teknologi maupun proses dari pemberdayaan saat sedang dilakukan.

5. Pengelolaan sistem

Pengelolaan sistem adalah tahapan memperlancar dan masyarakat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan baik secara individu maupun secara kelompok.

Tahapan pemberdayaan menurut Wilson (dalam Sumaryadi, 2005: 130) terdapat empat tahapan pemberdayaan yaitu *Awakening*, *Understanding*, *Harnessing and Using*.

1. *Awakening*: tahap ini dapat disebut juga sebagai penyadaran yakni masyarakat disadarkan akan keterampilan, sikap serta kemampuan yang dimiliki serta rencana dan harapan atas keadaan yang lebih baik.
2. *Understanding*: tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap pemahaman yaitu masyarakat diberikan persepsi serta pemahaman baru terkait diri mereka, pendapat mereka dan kondisi yang bersifat umum lainnya.
3. *Harnessing*: tahapan ini dilakukan sesudah masyarakat mengerti dan sadar serta diterima baik oleh masyarakat terkait pemberdayaan sehingga mereka perlu menentukan kemanfaatan untuk keberlangsungan kelompoknya.
4. *Using*: tahapan ini adalah menggunakan kemampuan serta keterampilan menjadi bagian dari kehidupan sehari - harinya.

Tahapan pemberdayaan selanjutnya dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3 - 6) menjabarkan terdapat tiga tahapan pemberdayaan yakni:

1. Penyadaran. Tahapan pemberdayaan merupakan tahap memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak memiliki yang perlu dibangun. Penyadaran tersebut dimulai dari diri mereka sendiri. Hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah memberikan edukasi yang bersifat *belief*, *kognisi* dan *healing*. Prinsip dasar tahapan penyadaran ini adalah membuat masyarakat menjadi mengerti dan faham bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses yang dilakukan berawal dari mereka sendiri.

2. Pengkapasitasan. Tahapan kedua yaitu tahapan pengkapasitasan merupakan tahapan membentuk kemampuan atau "*capacity building*". Pembentukan kemampuan ini dilakukan setelah masyarakat diberikan kedadaran melalui edukasi dan masyarakat telah faham serta siap menerima daya yang akan diberikan. Masyarakat berikan daya dengan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan individu atau kelompok sehingga dapat menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
3. Pendayaan. Tahap pendayaan merupakan tahapan akhir yaitu target diberi daya, kekuasaan dan otoritas bahkan peluang sesuai dengan kemampuan (kapabilitas dan kapasitas) serta memberikan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan tahapan pemberdayaan dapat melalui bermacam - macam tahapan sesuai dengan kondisi dan keadaan dari yang akan diberdayakan. Tahapan pemberdayaan dimulai dari memahami manusia terlebih dahulu dalam hal ini berarti masyarakat menuju pada memahami kondisi lingkungan untuk menyesuaikan keberjalan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik, kemudian melakukan tahapan pemberdayaan selanjutnya hingga pada tahap untuk dapat secara utuh mamandirikan masyarakat agar lebih sejahtera melalui potensi atau kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang melalui beberapa tahapan agar masyarakat dapat benar - benar berdaya dan merasakan manfaat dari adanya pemberdayaan. Pada hakekatnya pemberdayaan digunakan untuk menjadikan

seseorang mandiri baik dalam tindakan maupun berfikir. Pada Penelitian ini dalam menilai tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Gedawang Asri Kelurahan Gedawang akan menggunakan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto berupa Penyadaran, Pengkapasitasan dan Pendayaan.

1.7.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari faktor - faktor yang mempengaruhi. Faktor faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah menurut Fitri Nurhidayah (2017: 8) terdapat 3 faktor utama yaitu:

1. Kinerja Pengurus, hal ini terkait apa dan bagaimana kinerja dari pengurus dan hal - hal lainnya yang akan membawa pengaruh dalam kinerja pengurus. Hal ini mencakup bagaimana tingkat kerajinan dan keaktifan yang diberikan pengurus untuk mengurus Bank Sampah. Bagaimana tanggung jawab pengurus dalam handle tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Hal apa saja yang diberikan pengurus kepada nasabah dalam upaya pemberian pemberdayaan kepada masyarakat yang dapat berupa pelatihan, penyuluhan pengelolaan sampah yang diberikan pendamping.
2. Pembagian kerja, pembagian kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing - masing pengurus. Pembagian kerja yang spesifik, merata dan sesuai dengan kapabilitas masing - masing pengurus.
3. Partisipasi Masyarakat, hal ini berkaitan dengan bagaimana kesadaran, kemauan dan keaktifan masyarakat untuk mengetahui kegiatan atau program bank sampah.

Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat selanjutnya menurut Nurazizah Arifka (2021: 8) sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

1. Sarana dan Prasarana.

Bentuk sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penunjang yang sangat menguntungkan dalam implementasi suatu program atau kegiatan agar dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sarana dan Prasarana selanjutnya dikatakan sebagai bentuk dukungan karena dapat memudahkan dan penunjang bagi kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang didalamnya terdapat pelatihan - pelatihan yang akan diberikan. Sarana dan prasarana ini dapat menjadi cara pengurus dalam mengkoordinasi dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

2. Keterlibatan Masyarakat.

Terlibatnya masyarakat dalam hal ini pengurus maupun nasabah dalam Bank Sampah dapat menjadi bentuk motivasi agar masyarakat turut aktif dalam kegiatan dan dapat menjadi bentuk loyalitas yang diberikan kepada Bank Sampah. Hal lain yang dapat melancarkan kegiatan pengelolaan sampah ini yaitu adanya semangat, keterampilan serta kegigihan masyarakat atau nasaah Bank Sampah dalam prorses pemberdayaan yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat turut andil dalam membantu merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan setiap program.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan lahan, keterbatasan ini dapat menjadi faktor penghambat pemberdayaan melalui bank sampah karena dapat menjadikan setiap kegiatan tertunda atau terganggu.

Menurut Anggraini, Noor, dan Said (dalam Tulatifah 2020: 72) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan terdapat faktor yang mempengaruhi serta terdapat faktor yang menghambat sebagai berikut:

a. faktor pendukung

1. faktor internal

- a) Keterlibatan Anggota. Keterlibatan anggota ini dapat ditunjukkan melalui beberapa masyarakat sekitar pemberian pemberdayaan yang berpartisipasi aktif secara penuh serta bersedia untuk menjadi bagian dan menjalankan kegiatan yang telah ditentukan. Kesediaan masyarakat tersebut dapat membantu dalam proses keberjalan program pemberdayaan yang dilakukan secara maksimal.
- b) Sarana prasarana. Sarana prasarana dapat menjadi suatu aspek yang penting dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat dalam suatu progam. Sebab, dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai maka diharapkan akan dapat menunjang pemberdayaan yang ada dilakukan berjalan dengan lancar dan mengurangi hambatan secara teknis.

2. faktor eksternal

- a) keterlibatan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat sekitar diluar anggota dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keberjalanan

pemberdayaan yang ada. Adanya masyarakat yang terlibat merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu program. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program. Adanya keterlibatan ini akan menciptakan suasana yang baik dalam koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat.

b) kerjasama dengan pihak lain. Faktor eksternal ini dapat menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan pemberdayaan dengan baik. Pemberdayaan masyarakat dilakukan atas dasar sosial kemasyarakatan maka sangat memerlukan kerjasama dengan banyak pihak. Kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemberdayaan melalui Bank Sampah ini dapat berupa pemberian fasilitas penunjang kegiatan untuk menjalankan tujuan Bank Sampah.

b. faktor Penghambat

- 1) Ketidak disiplin nasabah, program yang dilakukan akan mendapat kendala apabila masyarakat tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Sampah. Ketidak disiplin ini sebagai bentuk tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya
- 2) Salahnya *mindset* yang dimiliki masyarakat sekitar, pemikiran yang tidak terbuka terhadap program yang akan dijalankan ini akan menjadi kendala bagi pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan cara untuk dapat mengubah *mindset* agar masyarakat menjadi lebih peduli.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dan penghambat dari suatu pemberdayaan yang dilakukan pada suatu

wilayah tergantung bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan dan faktor lainnya yang mempengaruhi. Pada penelitian ini untuk melihat bagaimana faktor pendorong dan penghambat tahapan pemberdayaan yang dilakukan di Bank Sampah Gedawang Asri maka aspek yang digunakan adalah:

a) Faktor Pendorong

1. Keterlibatan Anggota
2. Sarana dan Prasarana
3. Keterlibatan Masyarakat Sekitar
4. Kerjasama dengan Pihak Lain

b) Faktor Penghambat

1. Ketidak disiplin nasabah
2. Salahnya *mindset* yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

1.8. Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang, merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan, dan menambah pengetahuan terkait pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan yang berguna untuk membantu pengelolaan lingkungan, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat di Kelurahan Gedawang Asri melalui program Bank Sampah. Di dalam menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri yang dilakukan pengelola Bank Sampah, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat dan faktor pendorong serta penghambat pemberdayaan masyarakat. Adapun dimensi dan

indikator untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Kota Senarang adalah sebagai berikut:

1.8.1. Tahapan Pemberdayaan

a) Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahapan paling awal, pada tahap ini berisi tujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan dan hak sehingga perlu dibangun dan diberdayakan yang mulai dari diri mereka sendiri. Di dalam menganalisis penyadaran di Bank Sampah Gedawang asri, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi oleh pengelola Bank Sampah
2. Musyawarah Pengurus dengan Masyarakat
3. *Reward and punishment* yang diberikan kepada nasabah Bank Sampah Gedawang Asri.

b) Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan adalah kegiatan untuk diberdayakan kecakapan dalam mengelolanya serta menggali kapasitas atau kemampuan yang dimiliki masyarakat gedawang asri untuk lebih terampil dan mampu mengambil peluang. Fenomena yang dilihat dari pengkapasitasan ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam pengelolaan Bank Sampah.
2. Pengembangan kapasitas nasabah melalui program bank sampah
3. Pengembangan kapasitas pengelola bank sampah

c) Tahap Pendayaan

Pendayaan merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat melalui Bank Sampah Gedawang Asri untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat sesuai dengan minat dan kemampuannya. Di dalam menganalisis pendayaan ini fenomena yang diaminati adalah sebagai berikut:

1. Peluang yang diberikan kepada masyarakat
2. Peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) melalui Bank Sampah
3. Perubahan Karakter

Disamping ingin menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakuka oleh Bank Sampah Gedawang Asri, penulis juga akan menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi tahapan pemberdayaan yang dilakukan baik faktor pendorong maupun faktor pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1.8.2. Faktor Pendorong dan Penghamabat Pemberdayaan Masyarakat.

a) Faktor Pendorong

1. Keterlibatan Anggota
2. Sarana dan Prasarana
3. Keterlibatan Masyarakat Sekitar
4. Kerjasama dengan Pihak Lain

b) Faktor Penghambat

1. Ketidak disiplin nasabah
2. Salahnya *mindset* yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena data hasil dari penelitian berkenaan dengan data yang ditemukan di lapangan penelitian dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena data yang terkumpul berbentuk kata - kata atau gambar tidak menekankan pada angka.

Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak - banyaknya terkait yang diteliti kemudian digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan serta, lebih menekankan pada proses dan makna. Pemilihan desain penelitian ini ditujukan untuk dapat memperoleh data deskriptif berupa kata - kata tertulis maupun lisan dan perilaku seseorang yang diamati sehingga penelitian ini dapat dibahas lebih dalam oleh peneliti berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang ada di lapangan.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian atau wilayah penelitian adalah lokasi dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah maksudnya, peneliti tidak melakukan manipulasi tempat penelitian. Situs penelitian ini adalah bank sampah Gedawang Asri yang terletak di Jalan H. Suradi No. 3 Gedawang, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Seorang informan harus benar terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam memilih informan juga dilihat dari kompetensi dan kesesuaian dengan permasalahan yang sedang diteliti bukan hanya sekadar mengahadirkannya sehingga penentuan metode yang tepat untuk digunakan dalam memilih informan perlu diperhatikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan yaitu teknik *Purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu dan mengabaikan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau melalui pertimbangan bahwa narasumber memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dan *accidental Sampling* yaitu dengan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja tanpa perencanaan sebelumnya. (Sugiyono, 2009: 85).

Informan Penelitian:

1. Ketua Bank Sampah Gedawang Asri
2. Wakil Ketua Bank Sampah
3. Pengelola Bank Sampah
4. Koordinator RW Bank Sampah Gedawang Asri
5. Masyarakat akan menggunakan Teknik *incidental sampling*

1.9.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif merupakan kata - kata dan tindakan, dokumen, maupun sumber tertulis (Lofland dalam Moleong, 2012: 157).

1. Kata dan tindakan

Kata dan tindakan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Diperoleh melalui hasil wawancara dan pengamatan di lokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan terkit terkait topik penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah ‘Gedawang Asri’ di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik.

2. Sumber tertulis.

Sumber tertulis dapat diperoleh dari dokumen - dokumen yang relevan dengan topik penelitian, buku, jurnal maupun internet.

1.9.5. Sumber Data

Berdasarkan sumber data, penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dan sekunder penelitian terkait tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah di Kelurahan Gedawang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dan diolah secara langsung oleh peneliti dari sumber langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dan hasil observasi langsung. Data primer dalam

penelitian ini berupa jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data - data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber secara langsung seperti, laporan, dokumen jurnal, buku dan lain sebagainya. Data sekunder berperan sebagai data pendukung dari data primer.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari laporan terkait pengelolaan sampah, bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jurnal - jurnal, regulasi dan dokumen lainnya.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada seting ilmiah atau natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 208). Teknik ini sangat lekat digunakan dalam penelitian kualitatif dalam aspek pengumpulan data yakni seperti data pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan dari responden, dan lain lain. Berbeda dengan kuantitatif teknik pengumpulan data lekat dengan pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Maka sebab itu, teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data berdasarkan kenyataan dilapangan. Peneliti hanya dapat mengolah berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan keadaan yang sebenarnya melalui observasi. Dalam observasi

peranan terpenting adalah pengamat sehingga pengamat diharuskan jeli dan teliti dalam mengamati kejadian, gerak atau proses yang ada.

Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati proses pengelolaan bank sampah di Gendawang Asri dan bank sampah yang merupakan tanggung jawab dari Gedawang Asri. Mengamati terkait catatan lapangan, ucapan, tindakan dari masyarakat melalui program bank sampah ‘Gedawang Asri’ di kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sebelum, proses wawancara dilaksanakan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada informan yang terkait dengan bank sampah di Gedawang Asri terkait tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah di kelurahan Gedawang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggali data terkait hal hal atau variable dokumentasi dapat berupa; catatan, agenda, rapat notulensi, gambar, buku, transkrip dan lain sebagainya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen dapat berupa gambar maupun tulisan. Dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumen, data dan informasi dari mana saja sepanjang data tersebut berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.

Dokumen yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu, data laporan wajib perbulan pengepulan sampah di setiap RW, data timbulan sampah Kelurahan Gedawang, data Bank Sampah di Kota Semarang, data statistik sampah yang terkelola melalui bank sampah, gambar bentuk kegiatan bank sampah, hasil barang yang dihasilkan dari proses recycle dan reuse sampah - sampah yang dihasilkan dan lain sebagainya.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan melalui hasil dokumen, wawancara dan observasi dengan melakukan pengorganisasian data berdasarkan kategori, kemudian menjabarkannya kedalam unit - unit, melakukan analisis, menyusun kedalam pola dan memilah data - data mana yang penting atau tidak diperlukan, data yang telah dipelajari tersebut dibuat menjadi sebuah kesimpulan memudahkan untuk dipahami baik oleh penulis maupun dipahami oleh orang lain. (Sugiyono, 2016: 244).

Analisis data bersifat induktif berdasarkan pada fakta - fakta yang ditemukan lapangan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data dan Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan mencatat dengan teliti dan terperinci data yang telah diperoleh kemudian dirangkum untuk dipilih hal yang memfokuskan pada yang penting dan pokok sehingga, data yang direduksi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pencarian dan pengumpulan data apabila diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dari hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti permasalahan.

Reduksi data merupakan memilih hal - hal yang pokok, dicari tema dan polanya, memfokuskan pada hal - hal penting, proses merangkum, serta membuang yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama observasi data di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan supaya dapat melihat gambaran secara keseluruhan (Miles dan Huberman dalam Siyoto, 2015:123). Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengelompokkan data dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dalam bentuk, bagan, uraian singkat, grafik, tabel, *flowchart*, hubungan antar kategori dan lain lain.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru

yang belum pernah ada sebelumnya sehingga kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam menganalisa data. Verifikasi merupakan tahapan akhir dalam menganalisis data kualitatif.

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data atau keabsahan data digunakan untuk membuktikan pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan kualitas data yang reliable dan valid. Dibutuhkan pengujian dari data yang telah diperoleh peneliti. Penelitian dapat dikatakan valid apabila antara yang sesungguhnya terjadi dan yang dilaporkan oleh peneliti tidak ada perbedaan.

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan dalam melakukan pengujian keabsahan data penelitian dapat melalui berbagai teknik diantaranya melalui cara, sumber dan waktu dimaksudkan untuk melakukan pengecekan data kembali agar data yang didapatkan dapat teruji kredibilitasnya. Teknik ini biasa disebut Teknik Triangulasi yang meliputi cara/ teknik, sumber dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 teknik dalam menguji kualitas data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

1. Triangulasi Sumber

Teknik ini banyak digunakan untuk menguji kebenaran data dengan melakukan pengamatan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengamatan data dengan teknik yang berbeda namun sumber yang

sama dengan melakukan wawancara observasi dan dokumentasi secara bersamaan dan mendalam.